

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Definisi Administrasi Pembangunan

2.1.1 Definisi Administrasi Pembangunan

Menurut Hiram S, Phillips (dalam Anggara dan Sumantri 2016:23), administrasi pembangunan adalah” *rather than the traditional term of public administration to indicate the need for a dynamic process designed particularly to meet requirements of social and economic changes*” Pernyataan itu berarti “lebih baik daripada masa tradisional administrasi publik untuk menunjukkan kebutuhan terhadap suatu proses dinamis didesain secara khusus untuk mendapatkan syarat perubahan sosial dan ekonomi”

Menurut Mustopadidjaja (dalam Anggara dan Sumantri 2016 :24), “Administrasi pembangunan adalah “ilmu dan seni” tentang pembangunan suatu sistem mampu menyelenggarakan berbagai fungsi umum pemerintah dan pembangunan secara efisien dan efektif”.

Menurut Sondang P. Siagian (dalam Anggara dan Sumantri 2016:24), “Administrasi pembangunan adalah usaha yang dilakukan oleh masyarakat untuk memperbaiki tata kehidupan bangsa tersebut dalam rangka usaha pencapaian tujuan yang telah ditentukan sebelumnya”.

Di dalam melakukan pembangunan, Setiap pemerintah memerlukan perencanaan yang akurat serta diharapkan dapat melakukan evaluasi terhadap pembangunan yang dilakukannya. Seiring dengan semakin pesatnya pembangunan dibidang ekonomi, maka terjadi peningkatan data dan indikator-

indikator yang menghendaki ketersediaan data sampai tingkat Kabupaten / Kota, Data dan indikator yang dibutuhkan adalah yang sesuai dengan rencana yang telah ditentukan (Afiffuddin:2012).

2.1.2 Kebutuhan Administrasi Pembangunan

Administrasi pembangunan berkembang karena negara-negara berkembang memiliki kebutuhan untuk mengembangkan institusi dan institusi sosial, politik, dan ekonominya agar pembangunan sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Dari segi praktis dan ekonomis, administrasi pembangunan merangkum dua kegiatan besar dalam satu kesatuan pengertian, yaitu administrasi dan pembangunan. Perkembangan ilmu administrasi pembangunan, baik pada tataran teoritis maupun praktik, mengikuti perkembangan pemikiran studi administrasi, khususnya studi administrasi negara dan pembangunan. Oleh karena itu, upaya memahami administrasi pembangunan harus dimulai dengan pemahaman tentang administrasi pembangunan.

Tujuan administrasi pembangunan adalah membangun sistem administrasi sebagai sistem administrasi modern yang mampu menyelenggarakan pembangunan. Para ahli memberikan berbagai keterbatasan dan pemahaman tentang administrasi pembangunan. Para ahli memberikan berbagai batasan dan pengertian mengenai administrasi pembangunan. Pada dasarnya administrasi pembangunan adalah bidang studi yang mempelajari sistem ketatanegaraan di negara berkembang dan upaya peningkatan kemampuannya. Artinya, kajian dan praktik administrasi pembangunan memerlukan perhatian dan komitmen terhadap

nilai-nilai yang mendasarinya dan perlu diwujudkan sebagai landasan etika birokrasi.

Dengan demikian, pengertian administrasi pembangunan dikelompokkan menjadi dua sisi *Pertama*, upaya untuk mengenali peran administrasi negara dalam pembangunan. Artinya, penyelenggaraan proses pembangunan, yang membedakannya dengan penyelenggaraan negara dalam arti umum. *Kedua*, mempelajari cara membangun administrasi dan tugas pembangunan.

Administrasi pembangunan mempunyai dua aspek penting, Yaitu aspek *atau* dimensi ruang (*spatial dimension of development administration*) dan kebijaksanaan publik.

1. Dimensi Spesial dalam administrasi pembangunan

Menurut, Anggara dan Sumantri (2016:65) Dimensi ruang dan daerah yang berkaitan dengan administrasi pembangunan daerah mempunyai beberapa aspek:

1) Aspek Regionalisasi atau Perwilayahan

Regionalisasi sebagai bagian dari upaya mengatasi aspek ruang dalam pembangunan, memberikan keuntungan dalam mempertajam fokus dalam lingkup yang lebih kecil dalam suatu negara.

2) Aspek ruang

Aspek ruang tercermin dalam penataan ruang. Pada hakikatnya, tata ruang merupakan lingkungan fisik yang mempunyai hubungan yang organisatoris/fungsional antara berbagai macam objek dan manusia yang terpisah dalam ruang-ruang.

3) Aspek Otonomi

Masyarakat di suatu negara tidak hanya tinggal dan berada di pusat pemerintahan tetapi juga di tempat-tempat yang jauh dan jauh dari pusat pemerintahan, Jika kewenangan dan penguasaan pusat atas SDM terlalu besar, akan timbul konflik atas penguasaan sumber-sumber daya tersebut. Untuk mencegah konflik tersebut dan meletakkannya kewenangan pada masyarakat untuk menentukan nasib sendiri sesuai dengan prinsip kedaulatan rakyat, diterapkan prinsip ekonomi. Melalui otonomi, upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah menjadi lebih efektif.

4) Partisipasi Masyarakat

Salah satu ciri atau ciri administrasi modern adalah pengambilan keputusan dilakukan sedapat mungkin pada tingkat yang paling rendah (*grass-root level*). Dalam hal ini, Masyarakat bersama-sama dengan aparatur pemerintah menjadi *stakeholder* dalam perumusan, implementasi, dan evaluasi setiap upaya pembangunan.

Pembangunan yang memberi kesempatan dan bertumpu pada masyarakat telah menjadi paradigma pembangunan yang relatif baru, tetapi sekarang berkembang dan dianut oleh para pakar seperti terungkap dalam banyak kepustakaan mengenai studi pembangunan.

5) Keragaman dalam kebijakan

Dari segi perencanaan pembangunan harus dipahami bahwa satu daerah memiliki perbedaan dengan daerah lainnya. Tidak ada satu daerah yang memiliki karakteristik yang sama, baik dari potensi ekonomi, sumber daya manusia, maupun kelembagaan masyarakat.

2. Kebijakan publik dalam administrasi Pembangunan

Menurut William N. Dunn (dalam Pasolong, 2019:47) “Kebijakan publik adalah serangkaian pilihan yang saling terkait yang dibuat oleh badan atau pejabat pemerintah dalam bidang-bidang yang berkaitan dengan tugas-tugas pemerintahan, seperti pertahanan, keamanan, energi, kesehatan, pendidikan, kesejahteraan umum, kriminalitas, perkotaan dan lain-lain”.

Di negara berkembang, kebijakan pembangunan merupakan substansi utama dari kebijakan publik. Setiap hari pemerintah di semua negara mengambil keputusan atas dasar kewenangannya untuk mengatur alokasi sumber daya publik, mengarahkan masyarakat, memberikan pelayanan publik, menjamin keamanan dan ketenteraman, dan sebagainya. Kegiatan itu hampir sama di berbagai negara baik negara maju maupun negara berkembang sekalipun tetap ada perbedaan antar-keduanya. Hal tersebut disebabkan oleh kondisi sosial ekonomi yang berbeda dan adanya kegiatan pembangunan di negara berkembang sebagai kegiatan yang ‘biasa’ dilakukan oleh pemerintah negara maju. “Sistem administrasi negara yang mampu menyelenggarakan pembangunan menjadi prasyarat bagi keberhasilan pembangunan Sistem ketatanegaraan yang mampu

menyelenggarakan pembangunan merupakan prasyarat keberhasilan pembangunan. Hal ini berarti administrasi negara mampu menghasilkan kebijakan-kebijakan publik yang baik dan mendorong kepentingan umum merupakan tantangan yang lebih besar bagi negara yang sedang membangun (Grandle dan Thomas, 1991)".

Pemaparan di atas tentang Kebutuhan Administrasi pembangunan, administrasi pembangunan yang terbagi menjadi 2 aspek penting yaitu aspek atau dimensi ruang dan kebijakan publik, Dari kedua aspek tersebut penulis ingin meneliti partisipasi masyarakat yang terdapat di dalam aspek Dimensi ruang, Yang Tertuang dalam Buku yang Berjudul Administrasi Pembangunan "Teori Dan Praktik" Oleh Anggara dan Sumantri, 2016 Menjelaskan bahwa Dimensi ruang yang berkaitan dengan administrasi pembangunan daerah mempunyai 5 aspek yaitu : 1. Aspek Regionalisasi atau Perwilayahan, 2. Aspek Ruang, 3. Aspek Otonomi 4. Partisipasi masyarakat, 5. Keragaman dalam kebijakan.

2.2 Konsep Partisipasi Masyarakat

2.2.1 Definisi Partisipasi

Pengertian yang secara umum ditangkap dari istilah *partisipasi* adalah, keikutsertaan seseorang atau sekelompok anggota masyarakat dalam suatu kegiatan. Pengertian seperti itu, nampaknya selaras dengan pengertian yang dikemukakan oleh beberapa kamus bahasa sosiologi. Partisipasi selama ini diperlukan sebagai masukan bagi proses pembangunan, sebagai prasyarat mutlak bagi terciptanya tujuan pembangunan.

Pengertian partisipasi secara umum adalah keikutsertaan seseorang atau sekelompok anggota masyarakat dalam suatu kegiatan.

Menurut Pidarta dalam Dwiningrum, (2011: 50) “Partisipasi adalah pelibatan seseorang atau beberapa orang dalam suatu kegiatan. Keterlibatan mental dan emosi serta fisik dalam menggunakan segala kemampuan yang dimilikinya (berinisiatif) dalam segala kegiatan yang dilaksanakan serta mendukung pencapaian tujuan dan tanggung jawab atas segala keterlibatan”.

Partisipasi menurut Huneryear dan Hecman dalam Dwiningrum (2011: 51) “adalah sebagai keterlibatan mental dan emosional individu dalam situasi kelompok yang mendorongnya memberi sumbangan terhadap tujuan kelompok serta membagi tanggung jawab bersama mereka”.

Menurut Bornby (dalam Mardikanto dan Soebiato, 2019: 81) mengartikan “partisipasi sebagai tindakan untuk “mengambil bagian” yaitu kegiatan atau pernyataan untuk mengambil bagian dari kegiatan dengan maksud memperoleh manfaat”.

“Partisipasi masyarakat adalah sebuah proses yang mungkin membawa kewenangan yang oleh Heller dalam (Tawan dan Yusuf, 2017: 13) digambarkan sebagai proses individu ambil bagian dalam pembuatan keputusan terhadap suatu lembaga, program dan lingkungan yang mempengaruhinya”

Sebagai suatu kegiatan Verhangen dalam (Mardikanto dan Soebiato (2019:81-82) menyatakan bahwa,

“Partisipasi merupakan suatu bentuk khusus dari interaksi dan komunikasi yang berkaitan dengan pembagian kewenangan, tanggung jawab dan manfaat”. Tumbuhnya interaksi dan komunikasi tersebut dilandasi oleh adanya kesadaran yang dimiliki oleh yang bersangkutan mengenai:

- Kondisi yang tidak memuaskan, dan harus diperbaiki;
- Kondisi tersebut dapat diperbaiki melalui kegiatan manusia atau masyarakatnya sendiri;
- Kemampuannya untuk berpartisipasi dalam kegiatan yang dapat dilakukan;

- Adanya kepercayaan diri, bahwa ia dapat memberikan sumbangan yang bermanfaat bagi kegiatan yang bersangkutan”.

Berdasarkan pendapat para ahli tersebut, dapat disimpulkan bahwa partisipasi merupakan suatu tindakan atau wujud kontribusi yang dilakukan oleh individu atau kelompok masyarakat yang mengikutsertakan dirinya atau turun langsung dalam suatu kegiatan yang bermanfaat, dalam hal ini turun langsung melaksanakan program bantuan dari pemerintah demi tercapainya tujuan akhir yang diinginkan masyarakat bersangkutan.

2.2.2 Bentuk Partisipasi Masyarakat

Oakley 1991:1-10 (Dalam Darmawi, 2014:11), menguraikan partisipasi ke dalam tiga bentuk yaitu sebagai berikut:

1. Partisipasi sebagai bentuk kontribusi, yaitu interpretasi dominan dari partisipasi dalam pembangunan di dunia ketiga melihatnya sebagai suatu keterlibatan secara sukarela atau bentuk kontribusi lainnya dari masyarakat desa mantapkan sebelumnya program dan proyek pembangunan.
2. Partisipasi sebagai organisasi, yaitu meskipun diwarnai dengan perdebatan yang panjang di antara para praktisi dan teoritis mengenai organisasi sebagai instrumen yang fundamental bagi partisipasi, namun dapat dikemukakan bahwa perbedaan organisasi dan partisipasi terletak pada hakekat bentuk organisasional sebagai sarana bagi partisipasi seperti organisasi-organisasi yang biasa dibentuk atau organisasi yang muncul dibentuk sebagai hasil dari adanya proses partisipasi. Selanjutnya dalam melaksanakan partisipasi masyarakat melakukannya melalui beberapa dimensi, yaitu:
 - 1) Sumbangan pikiran (ide atau gagasan)
 - 2) Sumbangan materi (dana, barang, alat)
 - 3) Sumbangan tenaga (bekerja atau memberi kerja)
 - 4) Memanfaatkan/melaksanakan pelayanan pembangunan
3. Partisipasi sebagai pemberdayaan, yaitu partisipasi merupakan latihan pemberdayaan bagi masyarakat desa, meskipun sulit didefinisikan akan tetapi, pemberdayaan merupakan upaya yang mengembangkan keterampilan dan kemampuan masyarakat desa untuk memutuskan dan ikut terlibat dalam pembangunan.

Hamijoyo (2007:21), mengemukakan 3 bentuk partisipasi sebagai berikut

1. Partisipasi pikiran yaitu partisipasi masyarakat menyumbangkan ide atau gagasan.

2. Partisipasi tenaga, yaitu partisipasi diberikan dalam bentuk tenaga untuk melaksanakan usaha - usaha untuk menunjang keberhasilan suatu program.
3. Partisipasi materi, yaitu menyumbang dalam bentuk harta benda, biasanya berupa alat-alat kerja atau perkakas.

2.2.3 Faktor Yang Mempengaruhi Partisipasi Masyarakat

Penumbuhan dan pengembangan partisipasi masyarakat seringkali juga terhambat oleh persepsi yang kurang tepat, yang menilai masyarakat” sulit diajak maju” (Geertz dalam Soewardi,1976). Padahal, menurut White (1978), persepsi seperti itu sebenarnya hanya dimiliki oleh orang-orang yang tidak memahami keadaan masyarakat. Di lain pihak, kesulitan penumbuhan dan pengembangan partisipasi masyarakat, juga disebabkan karena mereka sudah terlalu lama direkayasa untuk tidak perlu berpikir oleh penguasa, sehingga mereka lebih suka menerima apapun yang harus dilakukan/diinstruksikan, dibandingkan harus ikut bersusah payah untuk berpikir, merencanakan, memantau dan mengevaluasi kegiatan yang ditawarkan.

Secara konseptual, faktor-faktor yang mempengaruhi terhadap tumbuh dan berkembangnya partisipasi dapat didekati dengan beragam pendekatan disiplin ilmu. Menurut konsep proses pendidikan, partisipasi merupakan bentuk tanggapan atau *responses* atas rangsang-rangsang yang diberikan, yang dalam hal ini, tanggapan merupakan fungsi dari manfaat (*rewards*) yang diharapkan (Berlo, 1961).

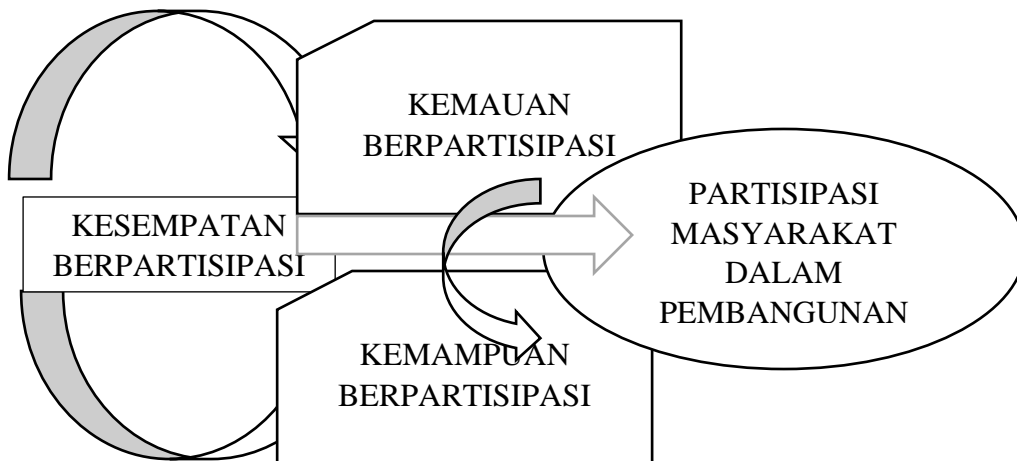
Menurut Slamet,1985 (dalam Mardikanto dan Soebiato 2019: 91), Menyatakan

“Bahwa tumbuh dan berkembangnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan, sangat ditentukan oleh tiga unsur pokok, yaitu:

1. Adanya kesempatan yang diberikan kepada masyarakat, untuk berpartisipasi seperti :

- 1) kemauan politik dari penguasa untuk melibatkan masyarakat dalam pembangunan, baik dalam pengambilan keputusan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pemeliharaan dan pemanfaatan.
 - a. Partisipasi dalam Pengambilan Keputusan
Partisipasi dalam pengambilan Keputusan adalah keikutsertaan masyarakat dalam pembuatan keputusan melalui perencanaan pembangunan, masyarakat dilibatkan dalam perumusan/proses pembuatan keputusan dengan mengemukakan pendapat/saran dalam menilai satu program/kebijakan yang akan ditetapkan.
 - b. Partisipasi dalam Pelaksanaan
Partisipasi dalam pelaksanaan adalah keikutsertaan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan. Partisipasi dalam pelaksanaan ini dapat berwujud kontribusi. Partisipasi pembangunan dapat dilakukan melalui keikutsertaan masyarakat dalam memberikan kontribusi guna menunjang pelaksanaan pembangunan yang berwujud tenaga, uang dan barang material
 - c. Partisipasi dalam kemanfaatan
Partisipasi dalam kemanfaatan adalah wujud peran dimana dalam keikutsertaan tersebut dapat memberikan manfaat lebih/positif bagi pemerintah dan masyarakat. Dengan partisipasi tersebut masyarakat harus menerima manfaat positif yang ditimbulkan dari kegiatan pembangunan tersebut
 - d. Partisipasi dalam evaluasi
Keikutsertaan dalam evaluasi merupakan keikutsertaan masyarakat dalam mengawasi dan menilai pelaksanaan hasil-hasil perencanaan. Masyarakat dapat memberi saran dan kritik terhadap pelaksanaan pemerintahan agar sesuai dengan apa yang telah direncanakan dan mencapai hasil hasil telah ditetapkan.
 - 2) Kesempatan Untuk Memperoleh Informasi
2. Adanya kemampuan masyarakat untuk berpartisipasi
Adanya kesempatan -kesempatan yang disediakan/ditumbuhkan untuk menggerakkan partisipasi masyarakat akan tidak banyak berarti, jika tidak memiliki kemampuan untuk berpartisipasi Yang dimaksud kemampuan disini adalah:
 - 1) Kemampuan melaksanakan pembangunan, yang dipengaruhi tingkat pendidikan dan keterampilan yang dimiliki:
 - 2) Kemampuan untuk memimpin, memecahkan masalah yang dihadapi dengan menggunakan sumberdaya (peluang) lain yang tersedia.
 3. Adanya kemauan masyarakat untuk berpartisipasi yaitu, Sikap untuk selalu ingin memperbaiki mutu hidup dan tidak cepat puas diri dan siap kebersamaan untuk memecahkan masalah, dan tercapainya tujuan pembangunan.

Tentang hal ini, adanya kesempatan yang diberikan, sering merupakan faktor pendorong tumbuhnya kemauan, dan kemauan akan sangat menentukan kemampuan (Gambar)



Gambar 2.1: Syarat Tumbuh dan berkembangnya Partisipasi Masyarakat

Menurut Dwiningrum (2011: 57) menyebutkan faktor-faktor yang dapat menghambat partisipasi masyarakat antara lain:

1. Sifat malas, apatis, tidak adanya kepedulian, tidak mau melakukan perubahan ditingkat anggota masyarakat
2. Aspek tipologi
3. Aspek Geografis (pulau - pulau kecil yg tersebar letaknya)
4. Demografis (Jumlah penduduk) Ekonomi (desa miskin/tertinggal)

Menurut Watson (dalam Soetomo, 2008:214), Menyatakan bahwa, “Selain faktor - faktor yang mendorong timbulnya partisipasi, juga terdapat kendala (hambatan) yang menghalangi terjadinya suatu perubahan antara lain kendala berasal dari kepribadian individu, misalnya ketergantungan. Ketergantungan masyarakat terhadap pemerintah dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan merupakan hambatan dalam mewujudkan partisipasi atau keterlibatan masyarakat secara aktif, karena rasa ketergantungan ini masyarakat tidak memiliki inisiatif untuk melaksanakan pembangunan atau prakarsa mereka sendiri”.

Partisipasi dalam penelitian ini yang akan dibahas adalah partisipasi dalam bidang pembangunan desa, lebih tepatnya adalah partisipasi dalam kegiatan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS). Penulis memfokuskan

pada Faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat Menurut, Slamet (dalam Mardikanto dan Soebiato 2019: 91)

2.3 Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS)

2.3.1 Konsep Keswadayaan

Keswadayaan masyarakat adalah manifestasi Kapasitas Masyarakat Untuk Berkembang Secara Mandiri (Soetomo, 2012). Kemandirian masyarakat ditunjukkan dengan ciri-ciri umum bahwa masyarakat yang memiliki kemampuan untuk memikirkan, memutuskan, hingga melakukan tindakan yang dianggap tepat sesuai kebutuhan dan kondisinya demi mencapai kesepakatan dan tujuan yang dicita-citakan dengan menggunakan kemampuan/sumber daya yang dimiliki, melalui proses penyadaran, pendidikan & pelatihan, pengorganisasian, pengembangan kekuatan, serta membangun dinamika. Istilah masyarakat madani ialah masyarakat yang sudah mandiri yang merupakan suatu kelompok atau suatu tatanan masyarakat yang mampu berdiri secara mandiri di hadapan negara atau penguasa, mempunyai ruang publik dalam menyampaikan pendapat, dan juga mempunyai lembaga-lembaga mandiri yang mampu menyalurkan aspirasi maupun kepentingan publik.

Dalam masyarakat yang mandiri mempunyai beberapa ciri antara lain

- Mampu memahami kebutuhan sendiri dan kelompoknya
- Mampu mengorganisir dalam kelompok yang solid dengan tatan sosial yang mapan
- Mampu mengidentifikasi, merumuskan dan menyampaikan aspirasi, kebutuhan, keinginannya secara transparan dan terukur

- Mampu membuat keputusan yang dapat menentukan nasib mereka baik berkenaan dengan saat sekarang maupun ke depan.
- Mampu melakukan kegiatan secara terencana, terjadwal, terorganisir dengan baik, akuntabel dan transparan
- Mampu mengembangkan diri menuju kesejahteraan.

2.3.2 Konsep Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS)

Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) atau yang biasa banyak diketahui dengan sebutan “Program Bedah rumah “Tertuang dalam Peraturan Menteri PUPR Nomor 07/PRT/M/2018 tentang ”Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya”. kegiatan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) adalah bantuan pemerintah berupa stimulan bagi masyarakat berpenghasilan rendah untuk meningkatkan keswadayaan dalam pembangunan/peningkatan kualitas rumah beserta prasarana, sara dan utilitas umum.

Rumah Swadaya adalah rumah yang dibangun atas prakarsa dan upaya masyarakat, Perumahan Swadaya adalah kumpulan rumah swadaya sebagaimana bagian dari permukiman baik perkotaan maupun pedesaan yang dilengkapi dengan prasarana, sarana dan utilitas umum.

2.3.3 Tujuan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya

Tujuan dari kegiatan/program BSPS adalah terbangunnya rumah yang layak huni oleh Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) yang didukung dengan prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU) sehingga menjadikan perumahan yang sehat, aman, serasi, dan teratur serta berkelanjutan.

2.4 Hasil Penelitian yang Relevan

Hasil penelitian yang relevan sangat membantu peneliti dalam mendukung penelitian yang akan dilakukan karena hasil penelitian yang relevan dapat dijadikan sebagai tolak ukur dan bahan perbandingan dalam penelitian. Adapun penelitian yang relevan oleh peneliti lain adalah hasil penelitian yang dilakukan oleh

1. Skripsi Syntia Bela Tama (2017) yang berjudul “Partisipasi Masyarakat Dalam Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) (Studi Komparasi di Kelurahan Way Halim Permai dan Kelurahan Gunung Sulah Kecamatan Way Halim Kota Bandar Lampung” Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian kualitatif. Tujuan dari penelitian ini untuk mendeskripsikan dan menganalisis komparasi partisipasi masyarakat dan faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa pada tahap pelaksana program BSPS partisipasi masyarakat di Kelurahan Way Halim Permai dinilai kurang partisipatif sedangkan di Kelurahan Gunung sulah partisipasi masyarakat dinilai lebih aktif.
2. Novi Novianti (2016) yang berjudul “Partisipasi Masyarakat Dalam Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Di Kelurahan Tembeling Tanjung Kabupaten Bintan” Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian Kualitatif. Penelitian ini menganalisis partisipasi dalam perencanaan, partisipasi dalam pelaksanaan, dan partisipasi dalam pemanfaatan hasil. Hasil dari penelitian ini Masih rendahnya partisipasi

masyarakat atau kesadaran masyarakat untuk berperan aktif dalam pembangunan hal ini menyebabkan terhambatnya program - program pemerintah yang mengedepankan partisipasi. Berdasarkan penjelasan tersebut, yang membedakan skripsi terdahulu dengan skripsi peneliti yaitu skripsi *Pertama*, membahas perbandingan/studi komparasi dan Peneliti *Kedua*, Menganalisis Partisipasi dalam Perencanaan, Pelaksanaan dan pemanfaatan hasil sedangkan pada skripsi ini peneliti membahas Faktor yang mempengaruhi Partisipasi Masyarakat Di Desa Jelemuk, Kecamatan Bika, Kabupaten Kapuas Hulu. Dan Persamaan dari Skripsi terdahulu adalah sama-sama Menggunakan Metode penelitian Kualitatif.

2.5 Kerangka Pikir

Sebagai upaya untuk mengatasi masalah perumahan dan pemukiman kumuh di Indonesia, pemerintah membuat kebijakan mengenai Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) yang tertuang dalam Peraturan Menteri PUPR Nomor 07/PRT/M/2018 tentang 'Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya'. Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) adalah fasilitasi pemerintah berupa bantuan stimulan untuk pembangunan/peningkatan kualitas rumah kepada MBR.

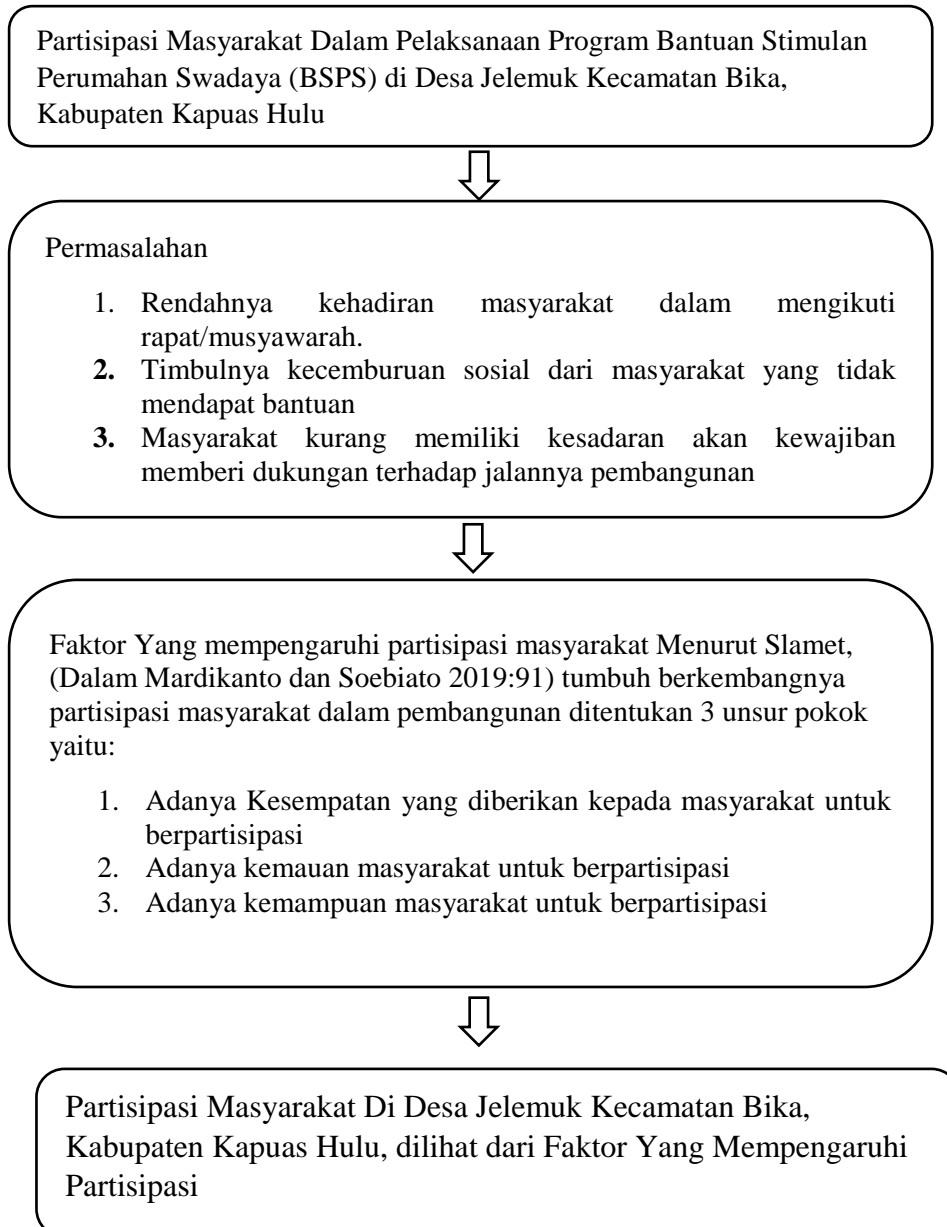
Bantuan yang diberikan berupa bahan material bangunan, Untuk lebih meningkatkan kualitas program BSPS, telah diterbitkan keputusan Menteri PUPR No. 158 tahun 2019 yang menaikkan besaran nilai BSPS. Kenaikan dana BSPS untuk dua kategori yakni Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya (PKRS) dan Pembangunan Rumah Swadaya Baru (PRBS). faktor penentu dari berhasil

tidaknya program ini salah satunya ditentukan partisipasi masyarakat itu sendiri sehingga program bantuan stimulan perumahan swadaya ini membutuhkan keterlibatan masyarakat dalam setiap tahap kegiatan pelaksanaan program agar tujuan dari program ini tercapai sesuai dengan keinginan.

Dalam penelitian ini, partisipasi masyarakat dalam program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya di Desa Jelemuk Kecamatan BIKI, Kabupaten Kapuas Hulu Faktor Faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat Menurut, Slamet,(dalam Mardikanto dan Soebiato 2019: 91) 1. Adanya kesempatan yang diberikan kepada masyarakat, 2. Adanya kemauan masyarakat, 3. Adanya kemampuan masyarakat. Secara sistematis kerangka pikir dapat digambarkan sebagai berikut:

GAMBAR 2.2

Kerangka Pikir



Sumber: Data diolah oleh penulis, 2021

2.6 Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan kerangka pikir yang dilandasi oleh kajian teoritis di atas, maka pertanyaan penelitian dapat diformulasikan sebagai berikut:

1. Apakah kesempatan yang diberikan kepada masyarakat untuk berpartisipasi sudah berjalan efektif pada program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Di Desa Jelemuk?
2. Apakah Masyarakat Desa Jelemuk memiliki kemauan masyarakat untuk berpartisipasi dalam Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya?
3. Apakah Masyarakat Desa Jelemuk Memiliki kemampuan masyarakat untuk berpartisipasi dalam Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya